



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

*Skripsi*

**ANALISIS RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
UNTUK MENILAI KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris Kab/Kota Di Prop. Sumatera Barat)**

Oleh:

**ELFIANTI**  
**04 153 101**

**Mahasiswa Program S1 Jurusan Akuntansi**

*Untuk memenuhi sebahagian syarat-syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG  
2009**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pengukuran analisis rasio laporan keuangan. Analisis rasio keuangan yang digunakan adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio aktivitas/keserasian, dan analisis *share and growth*. Data laporan keuangan diperoleh dari situs [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) dan dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Prop. Sumatera Barat untuk periode 2001-2007. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* dan metode kepustakaan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah tapi cenderung meningkat setiap tahun. Berdasarkan rasio efektivitas PAD, kab/kota sudah efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya. Aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan anggarannya masih berfokus pada belanja rutin/belanja operasi.

Kata Kunci: rasio keuangan pemerintah daerah, kinerja pemerintah daerah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dengan adanya reformasi pada tahun 1998 mengakibatkan perubahan mendasar di segala bidang, termasuk dalam bidang pemerintahan. Pada era reformasi ini pemerintah daerah dituntut agar mempunyai kinerja yang lebih efektif dan efisien dari tahun-tahun sebelumnya.

Sebelum reformasi sistem pemerintahan bersifat sentralistik, yaitu kebijakan dan keputusan dihasilkan oleh pemerintah yang berada di atasnya atau pemerintah pusat. Anggaran pemerintah daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat karena sebagian besar pendapatan dan belanja daerah diatur oleh pusat. Selain itu pemerintah pusat juga menentukan prioritas pembangunan dari tiap-tiap daerah. Akibatnya timbul ketimpangan karena adanya perbedaan pembangunan di tiap-tiap daerah.

Agar reformasi dalam bidang pemerintahan dapat dijalankan dengan lebih terarah, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah yaitu UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU ini dalam perkembangannya direvisi dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004.

Program otonomi daerah merupakan perwujudan dari reformasi di bidang pemerintahan. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat



setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam era otonomi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali, mengelola, memanfaatkan keuangan sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahannya (Wirawan dan Adi, 2007). Peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang lebih berkualitas.

Salah satu bentuk otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri keuangannya dimana sebagian penerimaan negara diserahkan pengelolaannya kepada daerah. Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola sumber daya / segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah

Hal ini berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran pemerintah daerah. Sebelumnya pendekatan penentuan alokasi lebih mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan sedikit peningkatan (*incremental*) tanpa merubah jenis atau pos belanja. Pendekatan dengan sistem ini disebut dengan sistem anggaran tradisional (*line item and incremental budgeting*). Setelah otonomi daerah tepatnya tahun 2003, pendekatan anggaran yang digunakan adalah anggaran berbasis kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja (*performance based budgeting*).

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pengukuran analisis rasio laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah seluruh kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat setelah diberlakukan otonomi daerah masih sangat rendah yaitu kurang dari 25 %. Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat adalah *instruktif*, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Tingkat kemandirian daerah cenderung meningkat setiap tahun namun ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Kesenjangan tingkat rasio kemandirian antar kabupaten dan kota cukup tinggi. Tingkat kemandirian kabupaten lebih rendah bila dibandingkan dengan kota.
- b. Berdasarkan rasio efektivitas PAD, secara rata-rata pemerintah daerah kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat sudah efektif dalam merealisasikan dan mengelola pendapatan asli daerahnya.
- c. Berdasarkan rasio aktivitas/keserasian, aktivitas pemerintah setelah otonomi daerah dalam membelanjakan anggaran masih berfokus pada belanja rutin/belanja operasi. Pemerintah daerah di propinsi Sumatera Barat belum dapat memprioritaskan pengeluarannya untuk belanja

## DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS.2003. *Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah :Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya Yang Dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. [www.google.com](http://www.google.com) . Diakses tanggal 25 Februari 2009.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Dwirandra, A.A.N.B. 2007. *Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002-2006*. [www.google.com](http://www.google.com). Diakses tanggal 19 Desember 2008.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Sektor Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang.1999.*Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE. Yogyakarta
- Kuncoro, M, 2002. *Otonomi Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga. Jakarta
- Laporan realisasi APBD Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Barat tahun 2007
- Laporan realisasi APBD kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat tahun 2001 s/d 2006 [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id). Diakses tanggal 29 Maret 2009
- Laporan APBD kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat tahun 2001 s/d 2006. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id). Diakses tanggal 29 Maret 2009
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS